

BAB I

PENDAHULUAN

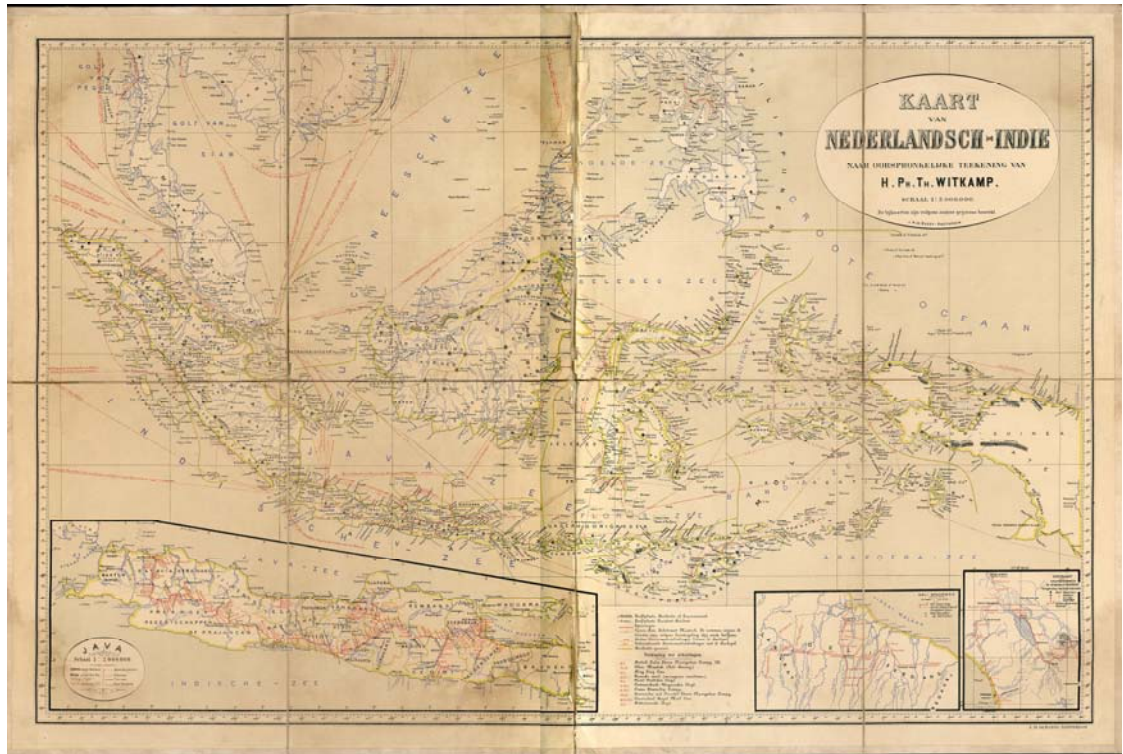
A. Latar Belakang Masalah

Suatu wilayah tentunya selalu mengalami dinamika dan perkembangan dengan adanya berbagai peristiwa penting termasuk revolusi. Salah satu momen penting yang menyebabkan revolusi yaitu kolonialisme Belanda yang mendapatkan perlawanan dari penduduk setempat yang berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan. Revolusi tersebut telah membuahkan hasil yaitu kemerdekaan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Revolusi ternyata belum berakhir, perjuangan Indonesia masih berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda maupun perjuangan diplomatik untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan secara de facto dan de jure, sehingga tahun 1945 – 1949 sering disebut sebagai masa revolusi kemerdekaan atau revolusi fisik.

Berbagai pulau yang ada di Indonesia memiliki nilai strategis yang menyebabkan kedatangan penjajah termasuk di Sumatra. Sumatra memiliki arti penting hingga sekarang terutama sebagai tempat penghasil pertanian melalui perkebunan. Sumatra pernah dikenal sebagai *Svarnavipa of Gold Island* yang bermakna pulau yang menghasilkan banyak emas, selain itu Sumatra merupakan pusat perdagangan rempah-rempah¹ sehingga para penjajah seperti Portugis, Belanda dan Inggris berusaha datang ke Sumatra. Belanda pernah berkuasa kurang lebih 350 tahun di Indonesia termasuk Sumatra. Peta wilayah kekuasaan Hindia Belanda dapat diamati pada gambar 1. Wilayah Sumatra antara lain meliputi Aceh, Deli, Brastagi, Minangkabau, Palembang.

¹ Arti penting Sumatra terutama di masa kolonial yang memiliki berbagai potensi terutama bidang agraria dapat diamati salah satunya dalam karya William Marsden, (1811). *History of Sumatra* 3rd ed. London: Black-Horse Court and Longman

Gambar 1. Peta Wilayah Kekuasaan Hindia Belanda



Sumber: Kaart van Nederlandisch-Indie naar oorspronkelijke teekening van H. Ph. Th. Witkamp", J.H. deBussy, Amsterdam, ca. 1893."

17 Maret 1824, Britania dan Belanda menandatangani Perjanjian London dan membagi Hindia Belanda di antara mereka sendiri. Belanda mengklaim Sumatra, Jawa, Maluku, Irian Jaya, dan lain-lain. Britania mengklaim Malaya dan Singapura, dan mempertahankan kepentingannya di Borneo Utara.

The Dutch venture into full-blown empire-building began with the strong and independent Muslim sultanate of Aceh. Aceh, on the vast and promising island of Sumatra, is known today as a centre of bitter conflict and rebellion. Its name also dripped blood in the nineteenth century. The French, British and Dutch were all trying to consolidate their holdings in Southeast Asia, and were interested in the natural wealth that Aceh had to offer, particularly pepper and oil. In 1873 the Dutch invaded Aceh, little realising that it would take thirty years to complete the takeover.²

² Adrian Vickers (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 8

Berbagai peristiwa perlawanan terhadap penjajahan Belanda muncul di abad XIX antara lain Perang Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau, Perang Aceh (1873 – 1903), Perang Batak yang dipimpin Sisingamangaraja XII, Perang Mentawai (peta perang perjuangan melawan penjajah Belanda dapat diamati pada gambar 2), perang Palembang, Jambi dan sebagainya.

The colonial army rolled through sultanates and small kingdoms in Sumatra, Maluku, Borneo, the Southeast Islands and Sulawesi between 1901 and 1910. Some rulers, such as the Sultans of Tidore (Maluku), Pontianak (Kalimantan) and Palembang (Sumatra), wisely asked for Dutch protection from independent neighbours to avoid military conquest. By doing this they could negotiate better rights and conditions when they came within the colonial system.³

Gambar 2 Peta Perlawanan terhadap Belanda



Sumber: <http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/intro.htm>

Invasi Jepang di Asia Timur dan Tenggara tak dapat diduga bahkan mampu menundukkan kekuasaan Barat. Setelah Singapura jatuh ditangan militer Jepang, maka kedudukan pemerintahan Hindia Belanda tak dapat dipertahankan lagi. Serbuan tentara Jepang di Indonesia pada permulaan bulan Maret tahun 1942, dimana pada waktu itu berhadapan dengan armada laut Belanda di lautan jawa, ternyata Belanda tidak mampu mempertahankan pemerintahan Hindia Belanda dan ia dipaksa menyerah pada tanggal 8 Maret 1942. Syarat-syarat

³ *Ibid.* hlm. 14

penyerahan itu diumumkan oleh Komando Angkatan Darat Jepang di lapangan terbang Kalijati dekat Bandung, pada waktu itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir yang bernama Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer yang ditawan Jepang sekaligus pertanda berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.

Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.

Although news leaked out in August 1945 that the Allies had dropped a huge bomb that could destroy cities, the Japanese were reluctant to admit that they had surrendered. Sukarno, Hatta and the other older leadership were hesitant, but had their hands forced by the younger members of the new elite, who believed that 'the youth' had the duty to push for revolution. A group associated with Menteng 31 kidnapped Sukarno and Hatta to force them to agree to proclaim independence, which they did two days after the Japanese surrender, making their statement at Sukarno's house, Pegangsaan Timur 56, Jakarta, on 17 August 1945. Since this was the moment that formally ended what Sukarno called, with great exaggeration, 350 years of Dutch rule, and which launched one of the largest national revolutions of the twentieth century, the Proclamation could have been expected to be one of grand rhetoric.⁴

The Republic of Indonesia was born. Meanwhile the victorious Allies, almost entirely ignorant of what had transpired within Indonesia during the war, were hastily planning their arrival to accept the Japanese surrender and to restore the colonial regime. But the Japanese period had created conditions of such chaos, had so politicised the masses, and had so encouraged both older and younger Indonesian leaders to take the initiative, that the Allies were to find themselves confronted by a revolutionary war of independence.⁵

Selain itu proklamasi ini mempunyai nilai spiritual tinggi bila mau mengkaji dan menghayati kutipan berikut ini:

Proklamasi 17 Agustus 1945 terjadi bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364, Jum'at Legi, jam 10.00 dibacakan oleh Bung Karno dan didampingi oleh Bung Hatta, dengan mengibarkan bendera merah putih. Sepintas peristiwa akbar yang bersejarah ini dinilai sebagai peristiwa politik semata, tanpa dijiwai oleh ajaran Islam. Padahal Bung Karno sendiri sebagai pelaku sejarahnya menyatakan bahwa pemilihan tanggal 17 Agustus, dipengaruhi kewajiban shalat yang dijalankannya setiap hari sebanyak 17 rakaat. Dan lagi proklamasi terjadi pada bulan Ramadhan, karena Al-Qur'an pun diturunkan kepada

⁴ *Ibid.* hlm.95

⁵ Ricklefs, M.C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c.1200*. London: Palgrave, hlm. 260

Rasulullah pada 17 Ramadhan. Termasuk Jumat Legi dinilai oleh Bung Karno sebagai Jum'at yang bahagia.⁶

Kedatangan Sekutu yang berniat melucuti senjata tentara Jepang yang ditunggangi NICA (Netherlands Indies Civil Administration), membuat Kemerdekaan Indonesia terancam. Pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berniat menanamkan kembali kekuasaannya atas Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berjudul **“Revolusi Kemerdekaan di Sumatera pada Pertengahan Abad XX”** yang berfokus pada perjuangan kemerdekaan melawan Belanda serta dampaknya.

B. Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan tetap berada pada lingkup yang sesuai dan terarah, diperlukan beberapa pertanyaan yang membatasi masalah. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini yaitu sbb:

1. Apakah makna revolusi kemerdekaan di Sumatera pada pertengahan abad XX?
2. Bagaimana berjalannya perjuangan revolusi kemerdekaan di Sumatera pada pertengahan abad XX?
3. Bagaimana perubahan provinsi Sumatera dengan adanya revolusi kemerdekaan di Sumatera pada pertengahan abad XX?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, analitis serta objektif sesuai dengan metodologi dalam mengkaji proses terjadinya suatu peristiwa sehingga dapat memahami segala nilai yang terkandung di dalamnya
- b. Menerapkan metode penelitian sejarah dan historiografi
- c. Menambah referensi sejarah tentang revolusi di Sumatera

⁶ Ahmad Mansur Suryanegara (1996), *Menemukan Sejarah*, Bandung: Mizan, hlm. 288.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengkaji makna revolusi kemerdekaan di Sumatera pada abad XX
- b. Mengkaji tentang peristiwa revolusi kemerdekaan di Sumatera pada abad XX
- c. Mengkaji dampak revolusi di Sumatera pada abad XX

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai tolak ukur kemampuan penulis dalam meneliti, menganalisa, membaca sumber-sumber sejarah dan merekonstruksinya sebagai karya sejarah.
- b. Memberikan kontribusi untuk perkembangan sejarah lokal di Indonesia.

2. Bagi Pembaca

- a. Menambah pengetahuan bagi pembaca tentang makna revolusi kemerdekaan di Sumatera
- b. Menambah pengetahuan bagi pembaca tentang peristiwa sejarah revolusi kemerdekaan di Sumatera
- c. Memberi gambaran tentang keadaan Sumatera setelah revolusi kemerdekaan

E. Tinjauan Pustaka

a. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki peranan penting dalam proses penelitian sejarah sebagai sarana untuk menelaah literatur yang dilandasi pemikiran dan penelitian. Tinjauan pustaka juga diperlukan guna memperoleh data-data informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang dikaji. Tinjauan pustaka penelitian ini berfokus pada Sumatera pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia antara lain berkaitan dengan perang Palembang.

Perang Palembang adalah bagian dari rentetan peperangan anti kolonial terhadap penjajahan Inggris dan Belanda. Perang Palembang merupakan perang laut karena kesultanan Palembang Darussalam bercorak maritim. Perang

Palembang diawali dengan perang menghadapi armada laut Inggris pada tahun 1812 dibawah pimpinan Mayjen R. R. Gillespie. Keinginan Inggris yang menghendaki kesultanan Palembang sebagai bagian dari kekuasaan Inggris. Sultan Mahmud Badaruddin II menolak dengan tegas keinginan Inggris. Alasan penolakan Sultan Mahmud Badaruddin II untuk tidak menyerahkan kesultanan Palembang kepada Inggris karena Palembang bukan merupakan bagian dari Belanda. Sebelum terjadinya perjanjian Tuntang pada tanggal 18 september 1811, kesultanan Palembang telah merdeka penuh dengan mengusir pasukan kolonial Belanda dari *Loji* sungai aur.⁷

Penolakan yang dilakukan Sultan Mahmud Badaruddin II menyebabkan Inggris melakukan serangan pada tahun 1812 dibawah pimpinan Mayjen R.R. Gillespie. Inggris melakukan politik “*Devide et Impera*” untuk melengserkan Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan di kesultanan Palembang Darussalam dengan mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai sultan. Sultan Mahmud Badaruddin II dan putera mahkota (Pangeran Ratu) meninggalkan kesultanan Palembang menuju ke daerah pedalaman sungai Musi (Muara Rawas). Sultan Mahmud Badaruddin II dibantu oleh pengikut setia dan rakyat membangun kekuatan untuk melawan Inggris yang berkedudukan di kota Palembang. Dalam peperangan melawan pasukan Inggris yang berkedudukan di kota Palembang dengan strategi perang gerilya. Perlawanan pertama dilakukan dengan memutus semua jalur lalu lintas ke kota Palembang. Perlawanan yang dilakukan Sultan Mahmud Badaruddin II mendapat perlawanan dari Inggris dibawah pimpinan Mayor Mears (Residen Palembang dan Bangka) di daerah Buaya Langu. Taktik perang gerilya yang dipakai Sultan Mahmud Badaruddin II membuat pasukan Inggris mundur dan daerah Buaya Langu dapat dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Dalam pertempuran yang terjadi di Buaya Langu mengakibatkan Mayor Mears luka parah dan akhirnya tewas dalam perjalanan menuju pulau Bangka.⁸

⁷ Djohan Hanafiah,, *Perang Palembang 1819-1821*, (Palembang: Parawisata Jasa Utama, 1986)., hlm. 1.

⁸ *Ibid*, hlm. 60-61.

Mayor Robinson diangkat sebagai residen Palembang menggantikan Mayor Mears. Karena lambang kerajaan masih dipegang oleh Sultan Mahmud Badaruddin II dan pengaruh Sultan Mahmud Badaruddin II yang begitu besar sehingga pada tanggal 31 juni 1813 Mayor Robinson mengangkat kembali Sultan Mahmud Badaruddin II menjadi sultan di kesultanan Palembang Darussalam, sedangkan Sultan Ahmad Najamuddin II turun tahta dan menempati keraton di kota lama. Perang Palembang tahun 1819 dan tahun 1821 di latar belakang oleh ultimatum Mutinghe kepada Sultan Mahmud Badaruddin II untuk menyerahkan putera mahkota yaitu Pangeran Ratu. Strategi dan taktik yang digunakan Sultan Mahmud Badaruddin II dengan membangun kekuatan di benteng-benteng pertahanan dengan melengkapi benteng-benteng tersebut dengan meriam. Selain dengan meriam benteng pertahanan kesultanan Palembang dilengkapi juga dengan perahu rakit yang sewaktu-waktu bisa dibakar dan diarahkan ke kapal-kapal perang Belanda. Taktik Sultan Mahmud Badaruddin II untuk menghalau kapal perang Belanda dengan taktik diluar “*pagar*” (menghalau dan menghantam kapal-kapal perang Belanda di pintu masuk kesultanan Palembang yaitu pulau Bangka).⁹

Sultan Muhammad Bahaudin digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Raden Hasan Pangeran Ratu dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Sultan Palembang Darussalam yang ketujuh dan memerintah dari tahun 1803-1821.¹⁰

Konvensi London tanggal 13 Agustus 1814 menetapkan bahwa Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda semua koloninya diseberang laut, yang dikuasainya sejak Januari 1803. Kebijakan di pusat pemerintahan kolonial ini, tidak mendapatkan suatu tanggapan yang baik dari Raffles. Raffles yang menjadi frustrasi dengan adanya penyerahan Nusantara dari tangannya kepada Belanda, demikian pula kedudukannya di Bengkulu, satu pos kecil yang kepangkatannya tidak lebih dari Komisaris Komersial. Pemerintah Inggris masih mentolelir kemauan Raffles untuk menyandang Letnan Gubernur di Bengkulu. Thomas Stamford Raffles menggertak Batavia untuk mengosongkan Palembang dari

⁹ *Ibid*, hlm. 89.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 24-26.

pasukan Belanda. Ancaman Raffles adalah masalah Palembang yang akan dijadikan isu internasional selain dia tidak akan menyerahkan daerah Sumatera Barat ke Belanda. Alasan Raffles mencampuri urusan Palembang, karena Inggris diminta oleh Sultan Husin Diauddin untuk membantunya melawan Belanda yang membuat pemaksaan dalam perundingan dan merugikan pihak Palembang.¹¹

Belanda dibawah pimpinan Mutinghe mengultimatum Sultan Mahmud Badaruddin II untuk menyerahkan Putra Mahkota yaitu Pangeran Ratu. Jelas hal ini ditolak dengan tegas oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Selain itu Mutinghe sebagai Komisaris dengan sengaja dan lancang membuat kebijakan-kebijakan pemerintahan tanpa konsultasi dengan Sultan Mahmud Badaruddin II. Hal ini lah yang membuat Sultan Mahmud Badaruddin II mengambil sikap untuk mengusir Belanda dari Palembang.¹²

Belanda pada waktu itu tetap menganggap Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai Sultan Palembang yang sah. Mutinghe mulai menjalankan politik adu dombanya (divide et impera). Selain masih adanya perlawanan dari pihak Inggris, perlawanan rakyat dan Sultan Mahmud Badaruddin II membuat Belanda begitu sulit untuk menguasai Palembang. Di daerah Muara Rawas, penduduk serentak melawan Belanda. Didalam rombongan besar itu, terdapat orang-orang Minangkabau yang dulu juga pernah membantu Sultan Mahmud Badaruddin II.

Penduduk Muara Rawas mengepung Sungai Musi. Mereka merampas perbekalan dan amunisi yang dikirim ke Palembang. Pertempuran besar tidak dapat dihindarkan. Korban dipihak rakyat cukup banyak yaitu sebanyak 50 orang, dengan susah payah Mutinghe dan pasukannya kembali ke Palembang. Di pihak Belanda banyak jatuh korban selama Mutinghe mengadakan perjalanan ke pedalaman.¹³ Pasukan tambahan dari Batavia sebanyak 209 orang dibawah pimpinan Mayor Tierlam untuk menyerbu Palembang yang berangkat pada tanggal 4 Juni 1819 dengan kapal Elizabeth.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

¹³ Mardanas Safwan (2004), "*Sultan Mahmud Badaruddin II 1767-1852*", (Jakarta: Mutiara Sumber Widya)., hlm. 67-68

Sistem pertahanan Palembang dibangun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang seksama dan semua lalu lintas sungai di kuasai.¹⁴ Tidaklah mengherankan kalau di dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang mempunyai tugas khusus membuat sarana angkutan berupa berbagai bentuk dan ukuran perahu seperti *orang Senan atau Snouw* yang bukan saja ahli membuat perahu tetapi juga terkenal sebagai *ahli berkayu (orang-orang yang profesinya sebagai pengrajin)*.¹⁵ Di wilayah Kesultanan dikenal pula dengan daerah yang dinamakan “*Sikap*” yaitu kelompok dusun atau himpunan dusun yang dikeluarkan dari wilayah Marga dan diperintah langsung oleh pegawai Kesultanan.¹⁶ Kelompok *sikap* tersebut mengawasi dan menguasai Ogan dan Komering sebagai pusat penanaman padi dan penangkapan ikan.

Kelompok *sikap* lainnya ialah dusun – dusun yang terletak dibatas yang dapat dicapai perahu – perahu dagang (“*Toendan*” ialah *perahu dagang pakai atap*), antara lain *Sikap dalam Musi Ulu, Sikap dalam Lakitan, Muara Beliti, Baturaja dan Muara Rupit*. Jadi dengan demikian sistem sikap tersebut di atas merupakan salah satu unsur pertahanan wilayah yang alamiah dan ampuh.¹⁷

Perang Palembang merupakan perang melawan kedudukan Belanda di Palembang yang ingin menghancurkan Kesultanan Palembang namun mengalami beberapa kendala karena begitu kuatnya kekuatan Sultan Mahmud Badaruddin II sehingga sulit di taklukkan. Apalagi di daerah pedalaman sulit untuk dihancurkan karena Sultan Mahmud Badaruddin II memiliki kharisma dan wibawa yang tinggi dimata rakyatnya. Pada akhir Mei 1811, Thomas Stamford Raffles di dalam suratnya menyatakan bahwa ia berterima kasih apabila Sultan mau menghancurkan *loji* Belanda di Palembang. Selanjutnya dalam surat itu dinyatakan bahwa ada dikirim 80 pucuk senapan berikut 10 karung mesiu, serta dijanjikan pula bantuan militer.¹⁸

¹⁴ P. De Roo de la Farille, *op.cit.*, hlm. 11.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 44-45.

¹⁶ Van Royen J. W. “*De Palembangse marga en haar Grond – en Waterrechten*”, (Leiden: G.L. Van de Berg Adrianis Boekhandel, 1927), hlm. 37.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 37-38.

¹⁸ Stapel, F.H. “*Geschiedenis Van Ned, Indie*”, (Amsterdam: Meulenhoff, 1930), hlm. 227.

Sultan Mahmud Badaruddin II semakin matang dalam taktik dan strategi perang. Dia mengahului Belanda di luar “*pagar*”, yaitu dengan mengacau dan sekaligus menghantam Belanda dipintu masuk, yaitu di Pulau Bangka. Kemudian sepanjang jalur yang digunakan sebagai pintu masuk dibuat hambatan-hambatan dengan meriam pencur (yang ditembakkan secara tersembunyi).

Pada tanggal 1 September 1819 dengan kekuatan pasukan yang cukup kuat dan dengan perhitungan yang cukup matang, Mutinghe kembali menyerang Palembang. Pada serangan ini Belanda di bawah pimpinan Mutinghe berhasil di pukul mundur. Pada tanggal 3 November 1819, Belanda melakukan kembali serangan dengan melemahkan perdagangan dan perekonomian rakyat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil mematahkan semangat juang Sultan Mahmud Badaruddin II.

Pada tanggal 13 Mei 1821 sebagian armada Belanda telah mencapai Muntok. Armada tersebut kemudian bergabung dengan kapal-kapal yang telah ada, yaitu yang bertugas meronda dan memblokade Selat Bangka dan sekitarnya. De Kock mengadakan konsolidasi seluruh pasukan dan armadanya untuk menunggu saat yang tepat untuk memasuki sungai Musi. Tanggal 15 Mei 1821 armada Belanda meninggalkan Mentok untuk memasuki sungai Musi melewati Sungsang (anak sungai Musi).¹⁹ Pada tanggal 24 Juni 1821, Belanda kembali menyerang Palembang dan akhirnya menduduki benteng-benteng pertahanan Sultan Mahmud Badaruddin II. Pada tanggal 13 Juli 1821, Sultan Mahmud Badaruddin II dan Pangeran Ratu beserta keluarga-keluarganya diberangkatkan ke Batavia untuk kemudian diasingkan.²⁰

Pada tanggal 13 September 1811 Sultan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh semua pembesar, alim ulama dan pemuka-pemuka masyarakat. Sultan menjelaskan tentang kejadian-kejadian di Jawa lalu memerintahkan agar Loji Belanda di sungai Aur berikut penghuni-penghuninya diamankan. Sementara itu, di luar Kraton telah disiapkan sejumlah 2.000 orang lascar bersenjata lengkap. Pada tanggal 14 September 1811, ia mula-mula menolaknya, kemudian 87 orang

¹⁹ *Ibid.* hlm. 19-20.

²⁰ R.M. Husin Nato Dirajo, *op.cit.*, hlm. 7-9.

digiring naik ke kapal pada hari itu, rupanya mereka mengadakan perlawanan, oleh karena itu sampai di muara Sungsang mereka dibunuh semuanya dan kapal ditenggelamkan. Peristiwa ini dikenal dengan “*penyembelihan massal*” (*Palembang Massacre*). Belanda menuding Raffles (Penguasa Inggris di Indonesia) sebagai biang keladinya karena menghasut Sultan melakukan itu, tetapi Raffles menolaknya dan menuduh Mahmud Badaruddin II yang bertanggung jawab mengenai hal ini. Empat hari sebelum terjadi penyerahan di Tuntang Sultan Mahmud Badaruddin II telah mengakhiri pengaruh kekuasaan Belanda di bumi Palembang. Dalam peristiwa ini, Sultan Mahmud Badaruddin II telah membuktikan bahwa beliau sebagai seorang pemimpin yang mempunyai pandangan jauh kedepan dan dapat mempergunakan kesempatan yang tepat untuk membebaskan Kesultanan dan rakyat Palembang dari pengaruh kekuasaan asing.²¹

Awalnya perlawanan rakyat Jambi dengan Belanda masih bersifat pemboikotan penjualan hasil bumi, hutan, maupun perdagangan lain yang dimonopoli Belanda. Akibat pemboikotan ini, kantor dagang di Muaro Kumpeh ditutup, karena tidak ada transaksi penjualan hasil bumi kepada Belanda. Kondisi ini tidak diinginkan Belanda. Berbagai upaya untuk mengadakan perjanjian baru terus dilakukan kendati tidak mendapat tanggapan, apalagi Pangeran Ratu Thaha Saifuddin dalam kewenangannya sebagai Perdana Menteri semakin membatasi kemungkinan diadakannya pertemuan dengan Belanda.

Ketika Pangeran Ratu Thaha Saifuddin dinobatkan menjadi Sultan pada tahun 1856, ia tidak mengajukan restu ke Pemerintah Belanda. Sultan hanya memberitahun penobatannya, karena yang dibuat melalui perjanjian adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Sultan yang mengarah pada jalan pencaplokan kesultanan. Dengan berani Sultan Thaha membatalkan semua perjanjian dengan Belanda yang dibuat secara paksa oleh ayahnya.

Sikap perlawanan yang ditujukan Sultan sangat mengejutkan Belanda. Tak ada jalan lain, Belanda mengancam menangkap Sultan dan membuangnya ke Batavia. Sultan tak gentar, bahkan mempersiapkan pasukan menyerang Muaro Kumpeh.

²¹ Ibid, hlm. 6

Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah *Nederlandsch* Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 Tanggal 4 Mei 1906²².

Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih selama 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. perjalanan perjuangan Revolusi dari Rakyat Jambi serta dilengkapi dengan pembahasan mengenai pembentukan organisasi militer di daerah Jambi²³ yang dipicu oleh kedatangan bala tentara Jepang yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Jambi sehingga menimbulkan keinginan rakyat untuk membentuk kekuatan militer pada saat itu.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamkanlah Negara Republik Indonesia, yang mana pada masa itu Sumatera menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibukota sedangkan jabatan Gubernur dipegang oleh MR. Teuku Muhammad Hasan²⁴.

b. Historiografi yang Relevan

Penulisan sejarah sebagai suatu rekonstruksi peristiwa masa lampau yang membutuhkan sumber-sumber yang relevan dengan tema atau pokok bahasan. Historiografi merupakan rekonstruksi melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau.²⁵ Tahap penulisan sejarah mendorong sejarawan menggunakan kemampuan baik kemampuan teknis,

²² Dalam buku '*Sejarah sosial Jambi ; Jambi sebagai kota dagang*' (Jakarta ; Depdikbud, 1984)

²³ Bambang Suwondo, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jambi*, Jakarta: Depdikbud, 1979. Hlm. 59.

²⁴ Abu bakar Rony, *Penyusunan Pemerintahan Sipil dan Kekuatan Bersenjata tahun 1945- 1949 Di Daerah Keresidenan Jambi*, Jambi : Dewan Pimpinan Cabang legium Veteran RI Kabupaten Batanghari, 2009. Hlm. 18

²⁵ Louis Gottschlmk, *Mengerti sejarah*, a.b. Nugroho notosusanto, (jakarta ; UI Press,1986), hlm.32.

penggunaan kutipan atau catatan serta penggunaan pemikiran kritis dan kemampuan analisisnya terhadap suatu masalah. Hal ini dilakukan agar dalam tahap akhir penulisan, sejarawan dapat menghasilkan sintesis dari seluruh penelitian dalam bentuk tulisan disebut historiografi²⁶.

Historiografi yang relevan bertujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya sehingga dapat menghindari kesamaan hasil tulisan penulis dengan hasil tulisan sebelumnya. Penggunaan historiografi yang relevan sangat dibutuhkan sebagai pembanding dan penimbang sebuah karya penulisan sejarah.

Historiografi menurut Louis Gottschalk adalah proses rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan menganalisa secara kritis rekamna serta peninggalan sejarah masa lampau²⁷. Berdasarkan hal tersebut historiografi yang relevan sangat penting untuk mengetahui tingkat keaslian karya sejarah penulis. Historiografi yang relevan dibahas dalam tugas akhir ini bertujuan untuk menghindari kesamaan hasil karya penulis dengan hasil karya sejarah yang sudah ada. Adapun historiografi relevan dalam penulisan ini adalah :

Dalam meneliti sejarah perlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II terhadap Belanda, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah historiografi, seperti karya R.M Husin yang berjudul “Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II” dibuat untuk mengetahui sejarah yang dilakukan Sultan Mahmud Badaruddin II dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda yang terjadi di Palembang.²⁸ Dalam buku perang Palembang 1819-1821, karya Djohan Hanafiah menceritakan kegigihan Sultan Mahmud Badaruddin II dan rakyat Palembang melawan penjajahan Belanda.²⁹

²⁶ Helius Syamsudin dan Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1996), hlm .153.

²⁷ Louis Gottschlak *op cit.*, Hlm.32

²⁸ R.M. Husin Nato Dirajo, *Sejarah Perjuangan Almarhum Sultan Mahmud Badaruddin II*, (Sumatera Selatan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Museum, 1985).

²⁹ Djohan Hanafiah, *Perang Palembang 1819-1821*, (Palembang: Parawisata Jasa Utama, 1986).

Penulis juga menggunakan disertasi M.O. Woelders yang dalam disertasinya berjudul “ *Het Sultanat Palembang (1811-1825)* “ tokoh utama dari drama yang menghasilkan sebagian sejarah historiografi Indonesia ini tidak disangsikan lagi adalah Mahmud Badaruddin, yang menurut kesaksian pihak kawan dan lawan adalah orang besar (“*een man van format*”). Seorang Raja yang agung dengan amal-amalannya yang baik dan kurang baik, karena kepribadiannya yang kuat, maka baik Ahmad Najamuddin maupun anggota-anggota keluarga lainnya sepenuhnya dibawah pengaruhnya.³⁰ “ *Never a Tame Tiger*” judul karya Tulisan R.A. Lovell sudah menggambarkan sikap Sultan Mahmud Badaruddin II laksana “ harimau yang tak dapat dijinakkan”, pada akhir tulisan itu dikatakannya bahwa Sultan-sultan Palembang telah berjuang untuk kemerdekaan negerinya sampai detik nafas terakhir.³¹

Tesis karya Lindayanti Pasca Sarjana Ilmu sejarah FIB Univeritas Indonesia, yang berjudul *Perkebunan Karet Rakyat Di Jambi Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1906-1940*. Membahas tentang perkembangan karet rakyat diJambi pada masa awal dimulai dari penanaman karet di Jambi. Selain itu juga membahas tentang masa keemasan karet di Jambi sekitar tahun 1915³² yang membawa Jambi berada pada masa puncak kejayaan tanaman karet sebagai pengeskor utama tanaman karet sehingga membawa perbaikan ekonomi bagi masyarakat Jambi pada masa ini, masa yang dikenal dengan istilah masa hujan emas³³ di Jambi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian sebelumnya lebih berkonsentrasi terhadap masa-masa kejayaan hujan emas di Jambi dan juga membahas tentang menurunnya perekonomian petani karena disebabkan turunnya harga komoditas karet dunia. Sedangkan penelitian ini lebih berkonsentrasi terhadap masalah sosial ekonomi pada masa abad ke sembilan belas di Jambi.

³⁰ Woelders, M.O. “ *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*”, terjemahan H.A. Bustari, (Amsterdam: Martinus Nijhoff; 1975).

³¹ Lovell R.A. *Never a Tame Tiger*, majalah stanvac vol. III no. 5 May 1958. Halaman 18.

³² Lindayati *op cit.*, Hlm .38.

³³ *Ibid.*, Hlm. 54.

F. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Sejarah sebagai disiplin ilmu mempunyai metode tersendiri dalam mengungkapkan peristiwa sejarah masa lampau agar menghasilkan karya sejarah yang kritis, ilmiah, dan objektif. Metode sejarah adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah.³⁴ Metode sejarah adalah suatu proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisa secara kritis terhadap data-data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita yang dapat dipercaya.³⁵

Garraghan menyebut metode sejarah sebagai proses yang kompleks. Metode sejarah sebagai langkah mendasar, penilaian kritis terhadap sumber informasi dan eksposisi yang dijadikan dengan terperinci.³⁶ Dengan kata lain metode sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan.³⁷

Menurut Nugroho Notosusanto ada empat tahap dalam metode penelitian sejarah yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi.³⁸

Adapun langkah-langkah penulisan sejarah ini yaitu:

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik sebaiknya dipilih berdasarkan dengan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.³⁹

³⁴ Kuntowijoyo, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1994), hlm. xii.

³⁵ Helius Syamsuddin dan Ismaun, (1996), *op.cit.*, hlm. 61.

³⁶ Garraghan, Gilbert J., *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University, 1957), hlm. 33-34.

³⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 53.

³⁸ Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1971), hlm. 19.

³⁹ *Ibid*, hlm.91.

2. *Heuristik (pengumpulan data)* merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, materi sejarah atau evidensi sejarah.⁴⁰ Sumber merupakan hal yang paling penting dalam penyusunan karya sejarah. Tanpa adanya sumber peristiwa sejarah tidak akan dapat direkonstruksi menjadi sebuah kisah. Sumber sejarah merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau.⁴¹

Sumber sejarah diperlukan guna merekonstruksi peristiwa sejarah. Adapun sumber-sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sebuah sumber primer menurut Louis Gottschalk adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata-kepala sendiri atau saksi dengan panca indera lain, atau alat mekanis yang hadir dalam peristiwa tersebut.⁴² Sebuah sumber primer haruslah sejaman dengan terjadinya peristiwa.

Penelitian ini menggunakan sumber primer antara lain:

1. *Arsip Palembang no. 5. 1 Nota en rapporten over Palembang van het jaar 1811-1821. Berisi tentang catatan dan laporan mengenai Palembang dari tahun 1811 sampai 1821.*
2. *Arsip Palembang no. 72. 9 Bijdrage tel de History van Palembang. Berisi tentang kontribusi dalam sejarah Palembang*
3. *Arsip Palembang no. 47.6 Ingekomende stukken van de general major, opperbevel hebbet der Palembangse Expeditie, 1821. Berisi tentang perintah ekspedisi Gubernur Jenderal tahun 1821.*

⁴⁰Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm.89.

⁴¹ Helius Syamsuddin dan Ismaun, (1996), *op.cit.*, hlm.61.

⁴² Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 35.

4. *Arsip Palembang no. 66.7 Batavia 18 Februari 1820. Berisi tentang catatan mengenai kekuatan Palembang dalam Perang Palembang 1819-1821.*
5. *Arsip Palembang no. 41.11 Acte van Removatie. Berisi tentang tindakan removatie yang tertulis dengan bahasa Belanda dan bahasa Arab*
6. *Arsip No.004/BKRD/58 tentang Realisasi Provinsi Djambi*
7. *Pidato penjelasan dari BKRD disekitar Otonomi DJambi tingkat pertama*
8. *Arsip No.53/BKRD/57 tentang Peresmian Provinsi DJambi*

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder menurut Louis Gottschalk adalah kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata.⁴³ Sumber sekunder berupa kesaksian dari siapa saja yang bukan merupakan saksi mata. Sumber yang bersalah dari garapan terhadap sumber aslinya atau literatur. Sumber ini berisi bahan-bahan asli yang telah digarap sebelumnya. Sumber-sumber tambahan inilah yang menjadi sumber untuk menyusun penelitian ini, selain sumber primer.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pengujian terhadap sumber-sumber sejarah. Baik yang dilakukan secara intern (kritik intern) maupun secara ekstern (kritik ekstern). Kritik intern lebih berkaitan dengan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai sedangkan kritik ekstern berkaitan dengan otentitas atau keaslian sumber.⁴⁴ Tahap ini sangat menentukan langkah selanjutnya dalam tahapan interpretasi.

3. Interpretasi

Interpretasi dapat diartikan sebagai penafsiran. Interpretasi juga berarti mengerti, metode khusus yang diajukan guna mendekati

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995), hlm. 101.

sejarah.⁴⁵ Dalam merekonstruksi sejarah, sejarawan berupaya untuk menguraikan sumber, dimana sumber terkadang mengandung kemungkinan-kemungkinan sehingga ditemukan struktur logisnya berdasarkan fakta yang ada.⁴⁶ Dari berbagai fakta kemudian dirangkai menjadi suatu generalisasi yang urut agar mempunyai bentuk dan struktur setelah itu data yang terkumpul disatukan menjadi fakta yang akurat. Tahap ini terbagi dalam dua langkah, yaitu analitis dan sintesis. Analitis berarti menguraikan sedangkan sintesis berarti menyatukan. Dalam tahap interpretasi ini sejarawan dituntut untuk mampu mencari bagian-bagian yang hilang dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang lampau dan mampu menjelaskan realita masa lampau.

4. Historiografi

Historiografi yaitu penyampaian sintesis yang diperoleh melalui penelitian. Setelah melakukan analisis data akan dihasilkan sintesis hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk suatu karya sejarah yang dituangkan dalam bentuk tulisan.⁴⁷ Penulis menerangkan semua data yang telah terseleksi dan telah diinterpretasikan berdasarkan prinsip kronologi. Tahap ini merupakan tahap terakhir bagi penulis untuk menyajikan semua fakta ke dalam bentuk tulisan.

5. Penulisan (Sintesis) merupakan tahap terakhir dalam langkah penulisan sejarah. Tahap ini adalah penyampaian sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu karya sejarah. Penulisan ini disusun secara ilmiah karena ditujukan untuk penelitian skripsi.

⁴⁵ Kuntowijoyo, (1994), *op.cit.*, hlm. 3.

⁴⁶ Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 110.

⁴⁷ Kuntowijoyo, (1994), *op.cit.* hlm. 101.

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah menjadi masa lampau.⁴⁸ Untuk mengungkapkan peristiwa dalam penulisan sejarah, perlu dilakukan pendekatan multidimensional agar permasalahan yang diteliti dapat diungkapkan secara komprehensif. Pendekatan multidimensional ini memang sesuai untuk mempelajari fenomena historis secara kompleks. Ada nilai strategis dari pendekatan multidimensional ini, yaitu daya penerangnya untuk mengatasi pendekatan yang berakar pada filsafat tertentu dan menimbulkan determinisme.⁴⁹ Untuk memperjelas permasalahan yang terjadi maka pembahasan skripsi ini akan menggunakan pendekatan politik, pendekatan sosial, pendekatan sosiologis, dan pendekatan psikologis.

1. Pendekatan Politik

Pendekatan politik adalah segala usaha, tindakan atas suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dan bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah dan mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.⁵⁰ Menurut Deliar Noor adalah segala usaha, tindakan atas suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah dan mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.⁵¹ Pendapat lainnya yang mencoba mendeskripsikan persoalan tentang politik adalah pendekatan yang mengarah pada struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan dan lain sebagainya.⁵² Pendekatan politis ini digunakan untuk mengetahui situasi politik pada masa penjajahan Belanda, dalam proses penaklukan Kesultanan Palembang dan Jambi.

⁴⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), hlm. 71.

⁴⁹ *Ibid.*, 1993, hlm. 18.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵¹ Deliar Noor, *Pengantar ke Pemikiran Politik I*. (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm.5.

⁵² Sartono Kartodirdjo, *Op.Cit.*, hlm.144.

2. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial bertujuan untuk mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat yang terikat dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan agama dan tingkah laku.⁵³ Menurut Soerjono Soekanto Interaksi sosial merupakan dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan antarindividu, antarkelompok, atau antara individu dan kelompok. Menurut Astrid. S. Susanto adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Hasil interaksi sangat ditentukan oleh nilai dan arti serta interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi ini.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah suatu pendekatan yang menerangkan peranan sosiologi dalam menjelaskan perilaku manusia.⁵⁴ Pendekatan sosiologis ini dimaksudkan untuk meneropong segi-segi sosial peristiwa yang diteliti, misalnya golongan mana yang terlibat dan berperan serta nilai-nilai dan hubungannya dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan ideologi dan sebagainya. Pendekatan sosiologis dalam penulisan skripsi ini banyak digunakan.

4. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis sangat bermanfaat untuk melihat perkembangan sikap, perilaku dan kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Seperti disebutkan oleh Lades dan Tilly yang dikutip Helius Sjamsudin bahwa dengan dimasukkannya pendekatan psikologis dalam analisis biografis maka akan memperkaya pemahaman terhadap tingkah laku seseorang.⁵⁵ Tentang hal ini Sartono Kartodirdjo juga menegaskan bahwa untuk menyelami mentalis seorang tokoh diperlukan

⁵³ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Akasara. 1984), hlm.2.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 469.

⁵⁵ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 469.

analisis psikolog agar segi emosional, moral dan rasionalnya lebih bisa tampil.⁵⁶

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 40.